

STUDI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

OLEH

REZKI YANI
M 111 04 035



No. Inventaris	24-2-09
No. Klas	kehutan
	1.1.1.1
	1.1.1.1
	3.3
	SKE - KHOG
	YANI
	5

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Studi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Sektor Kehutanan di Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama : Rezki Yani

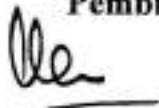
NIM : M 111 04 035

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
Pada
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. H. Svamsu Alam, M.S.
NIP : 131 467 221

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc.
NIP : 130 350 568

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**



T. Budiman Bachtiar, MS
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : Februari 2009

ABSTRAK

Rezki Yani (M 111 04 035) Studi Peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) Sektor Kehutanan di Kabupaten Maros. Dibawah bimbingan H. Syamsu Alam dan H. Mas'ud Junus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan asli daerah, kontribusi sektor kehutanan serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor kehutanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemahaman tentang penetapan dan penerapan sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan November sampai Desember 2008 di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan stakeholders yang terkait. Aspek-aspek yang didiskusikan meliputi penetapan dan penerapan potensi sumber-sumber PAD, mengetahui kontribusi dan strategi untuk peningkatan PAD. Dan data sekunder yaitu Data yang diperoleh langsung dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD sektor kehutanan berasal dari Retribusi Perizinan Usaha kehutanan dan Perkebunan, Retribusi Izin pemanfaatan Kayu Tanah milik serta Penerimaan Donasi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu. Adapun kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD kab. Maros dalam tiga tahun terakhir (2006-2008) adalah 0,004%,0,003%,0,005%. Strategi yang dapat ditempuh pemerintah Kab Maros dalam meningkatkan PAD sektor kehutanan antara lain adalah sebagai berikut Memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan izin pemanfaatan hutan tetapi dalam pemanfaatannya tetap memperhatikan kelestarian hutan dengan memperhatikan peraturan yang Penerapan retribusi pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan kondisi wilayah contoh Agroforestry dan MPTS (Multi Purpose Tree Species).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan HidayahNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun moril. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada **Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam. MS** dan **Dr. Ir. H. Mas'ud Junus. M.Sc** selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Kehutanan.
2. Bapak **Ir. Budirman Bachtiar. MS** selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan selama penulis menimba ilmu dan selaku ketua jurusan Manajemen Hutan Fakultas kehutanan Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muh Dassir. M.Si, Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf. M.Si** dan **Syamsu Rijal. S.Hut. M.Si.** selaku Penguji yang telah memberikan saran, bantuan dan koreksi dalam penyusunan skripsi. Semoga ALLAH SWT memberikan amal jariyah bagi ilmu yang diberikan.
4. Bapak **Ir. H. Zainuddin Munawar, M.Si** selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Maros beserta seluruh Staf khususnya staf Agribisnis dan Perizinan Dishutbun Kab. Maros.
5. Saudara-Saudariku tercinta : **Pelo[^]pid, wha_pid, ri_pid, Chu_pid, ni_pid, Je_pid, ju_pid,** syawal borjue 46, indraOne, awal, akmal.
6. Saudara-Saudariku di "Green House" : **Ocha, Beby, Emmi, Ira, Muzdalifa.S.Si.,Apt** yang tetap peduli meskipun jauh, **Fiank, rhyni.**
7. **Afriyanti P, Novi lilidarsi dan LD Apriyadi P .** serta teman teman forester angkatan 04 yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada Ayahanda **Bachtiar** dan Ibunda **Nani, Kakakku Muh. Rezal Putra** dan Kedua Adikku **Sri Juni arti, Muh Taufik Hidayah** beserta keluarga besarku di Makassar dan Polman yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan materi, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, Februari 2009

Penulis

Hidup adalah pilihan

Dan pilihanku adalah menjadi yang terbaik

Untuk orang-orang terbaik dalam hidupku

Seribu langkah berawal dari langkah pertama

Dan inilah awal dari hidupku

Kupersembahkan karya kecil ini buat

Semua orang terbaik dalam hidupku

^My Family and My best Friend^

By ^Q_pid^

DAFTAR ISI

No.	Teks	Halaman
	HALAMAN JUDUL	i
	HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
	ABSTRAK	iii
	KATA PENGANTAR	iv
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL.....	vi
	DAFTAR LAMPIRAN	vii
I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	3
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Hasil Hutan Dan Pengusahaan Hutan.....	4
	B. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	5
	C. Strategi Peningkatan PAD Sektor Kehutanan.....	9
	D. Analisis SWOT.....	11
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Waktu dan Tempat	12
	B. Metode Pengumpulan Data Dan Jenis Data	12
	C. Analisis Data	13
	D. Konsep Operasional	15

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak Geografis	17
2. Luas Kawasan Hutan	18
3. Keadaan iklim	20

B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Penduduk	23
2. Pendidikan	24
3. Perhubungan	25

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kehutanan Kab. Maros	26
--	----

B. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Maros	30
--	----

C. Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi PAD Sektor Kehutanan Kab. Maros	31
---	----

D. Strategi Peningkatan pendapatan Asli Daerah sektor kehutanan	35
--	----

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	39
---------------------	----

B. Saran	41
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Matriks Analisis SWOT	14
2.	Luas Daerah Diperinci Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Maros	18
3.	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi dan Lokasinya di Kabupaten Maros.....	19
4.	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu di Kabupaten Maros Tahun 2004-2007	20
5.	Data Curah Hujan Selama Periode 2002-2007 di Kabupaten Maros.....	21
6.	Jumlah Bulan Basah Dan Bulan Kering Selama 6 Tahun Terakhir di Kabupaten Maros.....	21
7.	Pembagian Tipe Iklim berdasarkan Q Ratio Menurut Schmidt dan Ferguson.....	22
8.	Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin Perkecamatan di Kota Maros.....	23
9.	Keadaan Sarana Pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Maros	24
10.	Sarana Perhubungan Yang Terdapat di Kabupaten Maros.....	25
11.	Besarnya Tarif Yang Dipungut Dalam Pemanfaatan kayu Tanah milik	27
12.	Penerimaan PAD yang Bersumber dari IPKTM	28
13.	Penerimaan PAD yang Bersumber dari Donasi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	29
14.	Besarnya Kontribusi Sektor kehutanan Tahun 2006-2008.....	30
15.	Tabel Matriks SWOT Berdasarkan Faktor internal dan Eksternal yang diperoleh dari Hasil Penelitian	36

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Daftar Perusahaan Pemegang IPKTM	
2.	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2006-2008	
3.	Daftar Industri IPHHK, IPHHBK dan TPT Bantilan	
4.	Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros	
5.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Maros	
6.	Bukti Pembayaran Donasi Hasil Hutan	
7.	Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.398/Menhut-II/2004	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi kehutanan telah mendorong terjadinya perubahan mendasar atas paradigma pengelolaan hutan semula berbasis Negara (*state base forest management*) menuju pengelolaan Hutan yang bertumpu pada sumber daya hutan yang berkelanjutan (*resource base management*), dan berbasis masyarakat (*community base management*). Salah satu perubahan sistem tersebut adalah diberlakukannya pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan hutan telah didesentralisasikan ke pemerintah daerah, khususnya tingkat Kabupaten. Seluruh lahan termasuk kawasan hutan berada dibawah administrasi pemerintah daerah. Seluruh kegiatan kehutanan, terutama beberapa yang dikecualikan, berada dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk merespon tuntutan reformasi yang dijiwai oleh semangat desentralisasi yang kuat. Dengan otonomi daerah (Otonomi Daerah) diharapkan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan akan lebih demokratis guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hasilnya langsung dapat dinikmati oleh daerah daerah secara merata.

Namun dalam pengelolaan hutan, penerapan otonomi daerah tidak hanya berdampak positif tetapi juga dapat berdampak negatif. Beberapa dampak positif yang dapat diperoleh pemerintah yaitu Kelembagaan kehutanan daerah bersifat mandiri dengan tugas dan fungsi yang jelas, mempunyai legitimasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan dibidang kehutanan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah, kebijakan-kebijakan kehutanan yang yang dikeluarkan lebih banyak berpihak kepada masyarakat dan membuka peluang bagi pengembangan pusat-pusat perekonomian di daerah. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu: Pemanfaatan sumber daya hutan secara besar-besaran oleh daerah dalam meningkatkan PAD, dapat menimbulkan konflik antara dua daerah otonom yang dimiliki secara bersama, dan dapat terjadi tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun terdapat beberapa kebijakan diatas, Pemerintah kabupaten berusaha untuk meningkatkan PAD sektor Kehutanan karena PAD digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan daerah, dan meningkatkan perekonomian penduduk daerah dengan tetap pertimbangkan konsep Hutan lestari. Kabupaten Maros sebagai daerah yang memiliki kawasan hutan seluas 68.529 ha, yang terdiri dari Hutan lindung, Hutan Produksi, Hutan Rakyat, yang dianggap perlu untuk diketahui kontribusi sektor kehutanannya, mengingat PAD sektor Kehutanan di Kab. Maros rendah dibanding sektor-sektor lainnya sehingga diperlukan bagaimana strategi peningkatannya. Bertitik tolak dari uraian diatas maka perlu adanya penelitian ini, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana strategi meningkatkan PAD sektor kehutanan di Kab. Maros Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan sumber-sumber PAD sektor Kehutanan Kabupaten Maros.
2. Mengetahui Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PAD Kabupaten Maros
3. Merumuskan strategi peningkatan PAD sektor kehutanan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bahan untuk memberikan pemahaman tentang penetapan dan penerapan sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Maros.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Hutan Dan Pengusahaan Hutan

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 pasal 1 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan berupa :

1. Hasil Hutan kayu seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, dsb.
2. Hasil Hutan Bukan Kayu Bambu, rotan, damar serta minyak yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dalam hutan.
3. Jasa meliputi jasa lingkungan misalnya taman wisata.

Sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariaannya.

Dalam rangka pemanfaatan hutan tersebut perlu diadakan pengusahaan dan pemungutan hasil hutan. Untuk itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang pengusahaan hutan dan pemungutan Hasil Hutan (Dephut., 2000).

Pengusahaan hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemenuhan hasil dan pemasaran hasil hutan. Tujuan pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan adalah mewujudkan keberadaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan (Tempo, 2004)

Pada dasarnya pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Perorangan, Lembaga Penelitian dan masyarakat hukum adat, dengan mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terselenggaranya pengelolaan kawasan hutan yang profesional dan bertanggung jawab, maka peluang usaha di bidang kehutanan bukan hanya terbuka semakin lebar, tetapi juga akan lebih terjamin kelestariannya (Dephut., 2000).

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan, dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya PAD ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, PBB serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonom tsb. (Widjaya. 2003)

Berdasarkan Undang Undang RI No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang penerimaan daerah disebutkan bahwa penerimaan daerah dalam masa pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Penerimaan daerah yang dimaksud bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan ; dan
- c. Lain-lain Pendapatan daerah

(a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah yang terdiri dari :
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan

4. Lain-lain PAD yang sah antara lain : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkn, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

(b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari :

a. Yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Pajak penghasilan

b. Yang bersumber dari sumber daya alam yaitu ;

- Kehutanan
- Pertambangan Umum
- Perikanan
- Pertambangan minyak bumi
- Pertambangan gas Bumi

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

(c). Lain lain Pendapatan daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan , yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

C. Strategi Peningkatan PAD sektor Kehutanan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Deshie Suprie (2008) di Kab. Luwu bahwa dalam menentukan strategi kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD di Kab. Luwu dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor internal yaitu kekuatan (Strenght) dan kelemahan (Weakness), sedangkan faktor – faktor eksternal yaitu peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat) :

1. Faktor Internal Kekuatan (Strenght). Faktor kekuatan yang dimaksud antara lain :
 - a. Kelembagaan Kehutanan yang telah ada
 - b. Peraturan-peraturan Daerah
2. Faktor Internal Kelemahan. Faktor-faktor kelemahan yang dimaksud antara lain :
 - a. Kurangnya sosialisasi secara formal kepada masyarakat
 - b. Implikasi Kebijakan Kehutanan Terhadap Kelestarian Hutan meliputi :
 - a) Sumber Daya Manusia DISHUTBUN masih relative kurang, sehingga output yang dihasilkan tidak optimal.
 - b) Kegiatan penataan dan menentukan batas hutan kawasan hutan masih jauh dari yang diharapkan.
 - c) Laju keinginan masyarakat untuk memperoleh areal pertanian dan perkebunan pada APL (Areal Penggunaan Lain) tidak diimbangi dengan luasan APL yang mencukupi.

3. Faktor Eksternal Peluang.

Faktor ini merupakan faktor penunjang yang dapat dimanfaatkan dengan baik demi untuk mempertahankan dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Faktor ini berasal dari luar daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 36 ayat 1.
- b. Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

4. Faktor Eksternal Ancaman

Faktor ini berasal dari luar yang merupakan rintangan dari berlakunya Peraturan Daerah. Hal ini dapat diatasi karena dapat merugikan daerah terutama dalam hal kas daerah (retribusi). Faktor eksternal ancaman yang dapat menjadi rintangan atau ancaman dari berjalannya Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Areal Hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat belum tertata.
- b. Potensi illegal logging.

Dengan menggunakan analisis SWOT berbagai macam strategi dapat dilakukan antara lain :

1. Memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat untuk memproduksi hasil hutan hak atau hutan rakyat sesuai dengan potensi dan daya dukungnya .

2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pelayanan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyadari akan pentingnya hasil hutan bagi mereka dan daerah.
3. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
4. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan.

D. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. (Rangkuti, 2000)

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai November sampai Desember 2008 di Kota Maros Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Metode Pengumpulan Data Dan Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan *Stakeholders* pada lembaga yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- a. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Maros
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maros.

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, maka data-data tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan *stakeholders* terkait. Dalam hal ini *stakeholders* yang dimaksud adalah staf Subdinas Agribisnis dan Perizinan Dishutbun Kab. Maros. serta Staf Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maros. Aspek-aspek yang didiskusikan meliputi bagaimana penetapan dan penerapan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Maros, mengetahui kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu Data yang diperoleh dari instansi yang terkait. Data ini dapat berupa data potensi daerah, data keadaan umum lokasi, luas potensi kawasan hutan serta data penerimaan PAD sektor kehutanan dan penerimaan sektor lain di Kab. Maros. Instansi tersebut antara lain : Badan Pusat Statistik Kab. Maros.

C. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diolah dan ditabulasi serta diklasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah :

- 1 Untuk mendeskripsikan sumber-sumber PAD sektor Kehutanan dan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD dilakukan dengan metode analisis Deskriptif yaitu hasil penelitian yang berwujud kata-kata, tulisan, yang berkaitan dengan fakta, keadaan, yang terjadi sesuai dengan kondisi penelitian.
- 2 Untuk mengetahui kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Penerimaan PAD sektor kehutanan}}{\text{Total PAD kab. Maros}} \times 100 \%$$

- 3 Untuk merumuskan Strategi peningkatan PAD sektor Kehutanan dilakukan Analisis SWOT yang akan digambarkan sesuai tabel Matrik SWOT dibawah ini:

Tabel.1. Matrik Analisis SWOT

FAKTOR	STRENGTHS (S)	WEAKNESS
INTERNAL		
FAKTOR EKSTERNAL	Faktor – faktor kekuatan internal	Faktor – faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Faktor – faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Faktor – faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti, 2000

Keterangan :

- Strategi SO

Menentukan strategi, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasikan secara optimal

- Starategi ST

Menentukan strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh kabupaten untuk mengatasi ancaman dari luar, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal.

- Strategi WO

Menentukan strategi dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada dari kebijakan tersebut, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

- Strategi WT

Menentukan strategi dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada didaerah serta menghindari dari ancaman, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal. (Rangkuti, 2000).

D. Konsep Operasional

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.
3. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
6. Otonomi Daerah adalah Suatu kewenangan untuk menggali pendapatan daerah sendiri bagi pembiayaan pembangunan daerahnya untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Kebijakan Kehutanan adalah Keputusan berupa peraturan daerah (Perda) yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros sebagai daerah otonom yang berkaitan dengan bidang pengelolaan hutan.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak Geografis

Kabupaten Maros secara Geografis terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40 45'50 07' Lintang Selatan Dan 109 295' 129 12 Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Maros berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah administratif Kabupaten Maros 1.619,12 Km², dengan potensi luas seperti itu oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah membagi menjadi 14 Kecamatan dan 103 Desa kelurahan pada Tahun 2008. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kabupaten Maros yaitu Kecamatan Tompobulu dengan luas 287,66 km² dengan persentase 17% dengan 8 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Turikale dengan luas 29,63 Km² dengan persentase 2% dengan 7 Kelurahan. Luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Luas Daerah Diperinci Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Maros, 2007

No	Kecamatan	Luas Area (Km)	Persentase (%)	Jumlah kelurahan
1	Mandai	49,11	3%	6
2	Moncongloe	46,87	3%	5
3	Maros Baru	53,76	3%	7
4	Marusu	73,83	5%	7
5	Turikale	29,93	2%	7
6	Lau	53,73	3%	6
7	Bontoa	93,52	6%	9
8	Bantimurung	173,7	11%	8
9	Simbang	105,31	7%	6
10	Tanralili	89,45	6%	8
11	Tompobulu	287,66	17%	8
12	Camba	154,36	9%	8
13	Cenrana	180,97	11%	7
14	Mallawa	235,92	14%	11
Jumlah		1.619,12	100%	103

Sumber: Maros Dalam Angka, 2007

2. Luas Kawasan Hutan

Sebagian besar hutan yang ada Di Kabupaten Maros yakni Hutan Lindung dengan luas 25.837 ha yang berlokasi di Kec. Bontoa, Kec. Bantimurung, Kec. Simbang, Kec. Tanralili, Kec. Tompobulu, Kec. Camba, Kec. Cenrana, Kec. Mallawa.

Luas Kawasan Hutan Berdasarkan fungsi dan Lokasinya di Kabupaten Maros tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi dan Lokasinya, 2007.

No	Jenis Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Hutan Wisata/ Suaka Alam	9.041	- Kec. Bantimurung - Kec. Simbang - Kec. Cenrana - Kec. Mallawa
2	Hutan Lindung	25.837	- Kec. Bontoa - Kec. Bantimurung - Kec. Simbang - Kec. Tanralili - Kec. Tompobulu - Kec. Camba - Kec. Cenrana - Kec. Mallawa
3	Hutan Produksi Terbatas	7.886	- Kec. Bantimurung - Kec. Tompobulu - Kec. Camba - Kec. Cenrana - Kec. Mallawa
4	Hutan Produksi Tetap/Biasa	25.765	- Kec. Bantimurung - Kec. Simbang - Kec. Tanralili - Kec. Camba - Kec. Cenrana - Kec. Mallawa
Jumlah		68.529	

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2007.

Produksi hasil hutan terdiri dari kayu dan non kayu, seperti jati dan Jambu. Produksi hasil hutan yang berupa kayu adalah 860 m³. Hasil lainnya yaitu kayu bakar sebesar 8,5 m dan bambu sebesar 85.500 batang. Produksi hasil hutan kayu dan non kayu dapat dilihat pada Tabel berikut.:

Tabel 4. Produksi hasil hutan kayu dan non kayu di Kabupaten Maros tahun 2004 - 2007

No	Jenis Kayu/non Kayu	Tahun (ha)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Jati	884.29	37,4	38	860	860
2	Rimba Campuran	35.000	-	-	-	-
3	Kayu Bakar	1.250	7.886	4,5	8,5	8,5
4	Bambu	175.000	25.765	35.550	86.100	85.500
5	Rotan	401.851	-	-	-	-
6	Getah Pinus	550.000	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Maros.

3. Keadaan Iklim.

Sebagai Unsur lingkungan, iklim dapat memberikan informasi tentang potensi suatu daerah diantaranya bermanfaat untuk mendukung pengelolaan suatu kawasan kaitannya dengan kebutuhan air terutama untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa unsur yang menentukan cuaca dan iklim yaitu: suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara dan curah hujan. Sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson sangat terkenal di Indonesia. penyusunan peta iklim menurut klasifikasi Schmidt – Ferguson lebih banyak digunakan untuk suatu iklim hutan. Pengklasifikasian iklim menurut Schmidt – Ferguson ini didasarkan pada nisbah bulan basah dan bulan kering seperti kriteria bulan basah dan bulan kering. Pencarian rata-rata bulan kering atau bulan basah dalam klasifikasian iklim Schmidt – Ferguson dilakukan dengan membandingkan jumlah/frekuensi bulam kering atau bulan basah selama tahun pengamatan dengan banyaknya tahun pengamatan.

Tabel 5. Data Curah Hujan selama periode 2002- 2007 di Kabupaten Maros

Bln	Tahun					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Jan	672	821	619	401	723	629
Feb	451	633	587	219	565	803
Mar	754	209	587	341	412	372
April	304	178	105	295	223	128
Mei	225	207	110	109	140	107
Jun	53	30	80	5	129	117
Jul	1	42	6	15	2	8
Agst	0	0	0	1	0	17
Sept	3	31	2	3	9	26
Okt	5	72	0	259	0	94
Nov	299	320	188	350	82	204
Des	585	1116	616	514	359	662

Sumber data: Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2007.

Pada umumnya tipe iklim di Indonesia berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bulan kering dengan curah hujan dibawah 60 mm
2. Bulan lembab dengan curah hujan antara 60 mm- 100 mm
3. Bulan Basah dengan curah hujan diatas 100 mm

Nilai rata-rata bulan basah, bulan kering dan bulan lembab selama 6 Tahun terakhir di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah:

Tabel 6. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering, dan Bulan Lembab selama 6 tahun terakhir di Kabupaten Maros.

No	Tahun	Bulan		
		Basah	Kering	Lembab
1	2002	7	5	-
2	2003	7	4	1
3	2004	7	4	-
4	2005	8	4	-
5	2006	7	4	1
6	2007	8	3	1
Rata-rata		7,3	4	3

Sumber Data: Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2007.

Untuk mengetahui tipe iklim pada lokasi penelitian, digunakan Q ratio, yaitu perbandingan rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah dan rata-rata bulan basah. Adapun perhitungan nilai Q ratio adalah sebagai berikut:

$$Q \text{ ratio} = \frac{\sum \text{rata} - \text{rata bulan kering}}{\sum \text{rata} - \text{rata bulan basah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Q \text{ ratio} &= \frac{4}{7,3} \times 100\% \\ &= 54,7\% \end{aligned}$$

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson Kabupaten Maros termasuk tipe iklim C dengan nilai adalah 54,7% yaitu tipe iklim Agak Basah. Tabel 7 menunjukkan klasifikasi iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Ferguson.

Tabel 7. Pembagian Tipe Iklim Berdasarkan Q ratio Menurut Schmidt dan Ferguson

Tipe iklim	Q ratio	Kriteria
A	0,0 – 14,33	Amat basah
B	14,33 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60,0	Agak basah
D	60,0 – 100,0	Sedang
E	100,0 – 167,0	Agak kering
F	167,0 – 300,0	Kering
G	300,0 – 700,0	Kering sekali
H	>700	Sangat kering sekali

Sumber: Benyamun Lakitan, 1997.

Berdasarkan nilai Q ratio pada Tabel 7, iklim di Kabupaten Maros termasuk tipe iklim C.

B. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Penduduk

Penduduk Kabupaten Maros pada akhir tahun 2007 menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007 telah berjumlah 301.696 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 148.223 jiwa dan perempuan berjumlah 153.473 jiwa. Jumlah penduduk tiap - tiap kecamatan di Kabupaten Maros, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perkecamatan di Kota Maros,2007.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mandai	15.157	15.460	30.617
2	Moncongloe	5,794	5.810	11.604
3	Maros Baru	11,084	11,991	22.575
4	Marusu	11,392	12,297	23.689
5	Turikale	17,683	18.401	36.084
6	Lau	11,104	11.354	22.458
7	Bontoa	12,407	13.102	22.509
8	Bantimurung	13,885	14.470	28.355
9	Simbang	10,859	11.359	22.218
10	Tanralili	12,144	12.018	24.162
11	Tompobulu	7,249	6.635	13.884
12	Camba	6,981	7.332	14.313
13	Cenrana	6,694	7.643	14.337
14	Mallawa	5,79	6.101	11.891
Jumlah		148.223	153.473	301.696

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros,2007.

Pada Tabel 8. dipaparkan keadaan penduduk akhir tahun 2007 berjumlah 301.696 jiwa. Kepadatan penduduk sangat tidak merata, meskipun demikian hal ini memberi gambaran cukup tersedianya tenaga kerja untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Maros.

Pemerintah daerah dapat melakukan pemanfaatan potensi daerah bagi pembangunan masyarakat dalam rangka terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan lahan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan penting terutama bagi generasi muda perlu di perhatikan dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Fasilitas pendidikan yang ada pada tiap kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Keadaan Sarana Pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Maros, 2007

NO	KECAMATAN	SD	SMP	SMU	SMK
1	Mandai	18	4	2	1
2	Moncongloe	8	4	2	
3	Maros Baru	17	3	2	
4	Marusu	13	3	1	
5	Turikale	21	6	4	3
6	Lau	15	4	2	1
7	Bontoa	25	1	1	
8	Bantimurung	27	5	2	
9	Simbang	19	4	1	
10	Tanralili	20	3	2	1
11	Tompobulu	13ss	3	1	
12	Camba	21	2	2	
13	Cenrana	19	2	1	
14	Mallawa	17	3	1	
	Jumlah	253	47	24	6

Sumber : Maros Dalam Angka, 2007

Berdasarkan Tabel 9 jumlah keseluruhan sarana pendidikan di Kabupaten Maros adalah 330. Dari tahun ketahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan

3. Perhubungan

Jalan merupakan sarana pengangkutan darat yang penting untuk menunjang dan memperlancar perekonomian. Makin meningkatnya usaha maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. Sarana Perhubungan yang Terdapat di Kabupaten Maros, 2007

No	Uraian	Panjang (Km)
1	Jalan Aspal	311,016
2	Jalan Kerikil	118,507
3	Jalan Tanah	878,364
4	Jalan Beton	49,56
Jumlah		1.357,45

Sumber: Maros Dalam angka, 2007

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kehutanan Kab. Maros

Pendapatan Asli daerah dari sektor kehutanan di Kabupaten Maros diperoleh dari retribusi daerah yaitu Retribusi Perizinan dan Donasi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu.

1. Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan (PUKP)

Berdasarkan PERDA No 11 tahun 2002 Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha Kehutanan dan Perkebunan. Perizinan ini terdiri dari beberapa jenis izin usaha kehutanan dan perkebunan, dan salah satu izin usaha yang menjadi sumber PAD sektor kehutanan adalah Perizinan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik. Penarikan retribusi PUKP ini diperoleh dari biaya administrasi penggunaan lokasi pemanfaatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin lokasi diatas 500 ha : Rp. 150.000,-/izin.
- b. Izin lokasi 50-500 ha : Rp. 100.000,-/izin.
- c. Izin lokasi dibawah 50 ha : Rp. 50.000,-/izin.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2006 ada empat (4) izin IPKTM dengan izin lokasi dibawah 50 ha, sedangkan pada tahun 2007-2008 tidak ada izin yang dikeluarkan.(Daftar Pemegang izin Pada Lampiran I)

2. Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah milik (IPKTM)

Berdasarkan PERDA No 12 tahun 2002 Pemanfaatan Kayu adalah pengolahan, penebangan, dan pengangkutan kayu sedangkan Kayu tanah milik adalah kayu yang berasal dari tanah milik yang dibebani bukti bukti hak-hak kepemilikan tanah yang sah. Jadi Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik adalah Pembayaran atas izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang atau badan yang memanfaatkan kayu tanah milik. Objek retribusi pemanfaatan kayu tanah milik ini meliputi :

- a. Jenis kelompok kayu indah.
- b. Jenis kelompok kayu meranti.
- c. Jenis kelompok kayu rimba campuran.
- d. Kayu Jati.
- e. Kayu Bakar

Dengan ketentuan penarikan tarif retribusi sebagai berikut :

Tabel.11 Besarnya tarif yang ditetapkan dalam pemanfaatan kayu tanah milik

Jenis kelompok kayu	Tarif satuan (Rp)/m ³
1. Kayu Bulat/ Log	
a. Kayu Indah	40.000,-
b. Kayu Meranti	30.000,-
c. Kayu Rimba campuran	20.000,-
d. Kayu Jati	20.000,-
2. Kayu Gergajian / Olahan	
a. Kayu Indah	70.000,-
b. Kayu Meranti	52.000,-
c. Kayu Rimba campuran	35.000,-
d. Kayu Jati	35.000,-
3. Kayu Bakar atau limbah	1500

Sumber : Peraturan Daerah No 12 tahun 2002 Kab Maros

Adapun hasil penerimaan PAD sektor kehutanan yang berasal dari IPKTM adalah sebagai berikut :

Tabel. 12 Penerimaan PAD yang bersumber dari IPKTM

Tahun	Jenis Kayu Bulat	Satuan (m ³)	Nilai Penerimaan (Rp)
2006	Jati	708,512	14.170.240,-
2007	Jati	41	820.000,-
2008	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan setelah diolah 2008

Berdasarkan Tabel 12 diatas diketahui bahwa jenis kayu yang dimanfaatkan pada usaha IPKTM dalam dua tahun terakhir adalah jenis kayu bulat jati dimana pada tahun 2006 sebesar 708,512 m³ dan pada tahun 2007 sebesar 41 m³ dan pada tahun 2008 tidak ada penerimaan. hal ini disebabkan pemberian izin IPKTM hanya ada pada tahun 2006.

3. Donasi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu

Berdasarkan PERDA No 18 tahun 2005 donasi adalah Pemberian pihak ketiga kepada daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sedangkan pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan kepada daerah.

Besarnya donasi adalah sebagai berikut :

- a. Donasi Kayu : Rp. 5.000,-/m³.
- b. Donasi Hasil Hutan Bukan Kayu : Rp. 15.000,-/mobil.

dengan bukti pembayaran yang disebut dengan RESU yang dibuat oleh DISPENDA setempat (Dapat dilihat pada lampiran 6)

Adapun hasil yang diperoleh dari Penerimaan PAD yang bersumber dari Donasi Hasil hutan kayu dan non kayu adalah sebagai berikut :

Tabel.13 Penerimaan PAD yang bersumber dari Donasi Hasil Hutan Kayu dan Non kayu

JenisDonasi	Satuan (m ³ /ton/mobil)			Nilai Penerimaan per tahun (Rp)		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Hasil hutan kayu						
a. Rimba campuran	10.237,701 m ³	11.501,35 m ³	12.932,35 m ³	51.188.505,-	57.506.750,-	64.661.750,-
b. Kayu meranti	-	2.125,49 m ³	88,7 m ³	-	10.627.450,-	443.700,-
Hasil hutan non kayu						
a. Rotan	200 mbl	300 mbl	270 mbl	3.000.000,-	4.500.000,-	4.050.000,-
b. Bambu	250 mbl	275 mbl	263 mbl	3.750.000,-	4.125.000,-	3.945.000,-
Jumlah				57.938.505,-	76.759.200,-	73.100.450,-

Sumber : Dinas Kehutanan dan perkebunan setelah diolah 2008

Berdasarkan Tabel 13 maka dapat dilihat bahwa jenis donasi hasil hutan kayu yang ada di Kab Maros berasal dari jenis rimba campuran dan jenis kayu meranti ,dimana jenis rimba campuran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dibanding jenis kayu meranti. Sedangkan donasi hasil hutan non kayu terdiri dari rotan dan bambu. Penerimaan donasi hasil hutan kayu dan non kayu terbesar diperoleh pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.76.759.200,-. Dan berdasarkan hasil penelitian penerimaan PAD sektor kehutanan tertinggi diperoleh dari Donasi hasil hutan kayu dan non kayu.

B. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah kab. Maros

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melihat sumber sumber PAD sektor kehutanan maka kontribusi sektor kehutanan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel .12. Besarnya kontribusi sektor kehutanan 2006-2008

Tahun	Target Penerimaan sektor kehutanan (Rp/thn)	Total penerimaan sektor kehutanan (Rp/thn)	Target PAD Kab. Maros (Rp/thn)	Total PAD Kab. Maros (Rp/thn)	Kontribusi Sektor Kehutanan (% / thn)
2006	60.000.000	72.258.745	19.518.025.000	17.545.080.321	0,004
2007	70.000.000	77.629.200	25.308.575.000	22.043.065.922	0,003
2008	70.000.000	69.569.950	31.004.175.000	13.865.538.767	0,005

Sumber: Dinas kehutanan dan perkebunan Kab.Maros setelah diolah 2008

Berdasarkan tabel 11 maka dapat diketahui kontribusi sektor kehutanan tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2006 sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kab. Maros sebesar 0,004 % dari total penerimaan sektor kehutanan sebesar Rp. 72.258.745,- terhadap PAD total kab. Maros yakni Rp.17.545.080.321,-.sedangkan pada tahun 2007 kontribusi sektor kehutanan mengalami penurunan sebesar 0,001% meskipun total penerimaan sektor kehutanan dapat melebihi target yang ditetapkan. Dan Pada tahun 2008 sektor kehutanan kembali mengalami peningkatan sebesar 0,002% dan dapat melebihi target yang ditetapkan.

Menurut hasil diskusi yang diperoleh dengan stakeholder dilapangan sektor kehutanan memang belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kab. Maros hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemberian izin IPKTM dalam dua tahun terakhir ini di Kab. Maros. sehingga PAD sektor kehutanan hanya berasal dari donasi hasil hutan kayu dan non kayu.

C. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi PAD Sektor Kehutanan di Kab. Maros

Berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD sektor kehutanan di Kab. Maros antara lain faktor Internal meliputi Kekuatan (Strenght) dan Kelemahan (Weakness) sedangkan faktor Eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat).

1. Faktor Internal Kekuatan (Strenght)

Faktor kekuatan merupakan modal dasar yang harus dipertahankan dan ditingkatkan agar pendapatan asli daerah sektor kehutanan kab. Maros dapat lebih meningkat. Faktor tersebut meliputi :

a. Peraturan Daerah

Dengan adanya peraturan daerah ini maka pemerintah dapat membuat kebijakan yang dijadikan landasan dalam penentuan penarikan retribusi sektor kehutanan, sampai saat ini ada dua PERDA yang dapat dijadikan kekuatan yaitu PERDA No 11 tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan dan PERDA No 18 tahun 2005 tentang Penerimaan Donasi.

b. Kelembagaan Kehutanan.

Kelembagaan ini meliputi struktur organisasi dan tata kerja Dishutbun Kab. Maros, sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Maros Nomor: 522/A.8/13/2008 tentang Penetapan Personil Pada Bagian Tata Usaha, Bidang Kehutanan, Perkebunan, Agribisnis, Polisi Kehutanan. (Pada Lamp.6). Kelembagaan ini dibentuk agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dibidang kehutanan dan Perkebunan..

- c. Luas Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan lindung, hutan produksi yang dapat dilihat pada tabel 3 keadaan umum lokasi .
- d. Kualitas SDM Dishutbun. Kualitas yang dimaksud adalah tingkat pendidikan pegawai dimana banyak pegawai yang menyanggah gelar sarjana baik S1 maupun S2. (Pada Lampiran 7)

2. Faktor Internal Kelemahan (Weakness)

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam peningkatan PAD sektor kehutanan sehingga kelemahan tersebut harus diminimalkan agar Pendapatan asli Daerah dapat terus meningkat antara lain :

- a. Kawasan Hutan Kab. Maros merupakan Hulu Das Jeneberang Walanae yang keberadaannya perlu dilestarikan dan menjadi penyangga bagi Kab. Lain khususnya Kota Makassar dalam hal penyediaan air bersih sehingga fungsi lindung lebih diutamakan.

- b. Kuantitas Sumber Daya Manusia Dishutbun khususnya Polisi Kehutanan yang hanya berjumlah 7 orang tidak sebanding dengan luas wilayah serta sarana dan prasarana operasional yang kurang mencukupi
- c. Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang pemanfaatan hutan yang berakibat adanya kasus illegal logging dan kebakaran hutan.

3. Faktor Eksternal Peluang (Oppurtunity)

Faktor ini merupakan penunjang yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mempertahankan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Faktor ini berasal dari luar kabupaten yang pemanfaatannya dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kab. Maros pada umumnya. Faktor eksternal peluang tersebut meliputi :

- a. Undang Undang No 41 tahun 1999 pasal 26,28 ayat 2 serta pasal 36 ayat 1.

Dalam Pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan baik itu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pada pasal 28 juga disebut demikian tetapi pada hutan produksi sedangkan Pada Pasal 36 ayat 1 dijelaskan tentang pemanfaatan hutan Hak yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya Undang Undang ini masyarakat diberikan kesempatan yang sebesar besarnya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

- b. Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dijelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - c. Letak Geografis
Kab Maros merupakan daerah yang strategis karena merupakan daerah yang paling dekat dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan sehingga peluang pasarnya sangat tinggi.
 - d. Peraturan pemerintah RI No.2 tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.
 - e. Peraturan pemerintah RI No. 3 tahun 2008 Perubahan atas PP No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- 4. Faktor Eksternal Ancaman (Threath)**
- Faktor ini berasal dari luar yang merupakan rintangan dari berlakunya Peraturan daerah Nomor 11 dan 12 tahun 2002 yang meliputi :
- a. Keputusan Menteri kehutanan No.SK.398/Menhut-II/2004 tentang perubahan fungsi sebagian besar kawasan hutan di Kab Maros menjadi Taman nasional Bantimurung Bulusaraung yang belum dilakukan pengukuran tata batas dan pemancangan PAL batas secara permanen.(Pada Lampiran 9)

- b. Penyalahgunaan Izin IPKTM yang dapat menyebabkan terjadinya illegal logging..

D. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Kehutanan

Berdasarkan faktor faktor diatas maka dapat digambarkan dalam matrik SWOT dibawah ini serta strategi strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta dapat meminimalkan kelemahan dan Ancaman. Yang kemudian dari strategi-strategi yang dibuat tersebut dipilih strategi yang menjadi perhatian utama yang harus ditangani agar peningkatan PAD dapat berjalan dengan baik, Untuk lebih jelasnya ada pada matrik SWOT Tabel 13 disamping :

Tabel.13 Matrik SWOT Berdasarkan Hasil Penelitian

Faktor internal	Kekuatan (Strength) (S)	Kelemahan (Weakness) (W)
Faktor eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah No 11 2. Peraturan Daerah No 18 3. Kelembagaan kehutanan yang telah ada. 4. Luas Kawasan. 5. Kualitas SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kawasan Hutan Kab Maros Merupakan Hulu DAS jeneberang walanae. 2. Kuantitas SDM Dishutbun. 3. Kurangnya Sosialisasi.
Keuntungan (Opportunity) (O)	Strategi SO	Strategi WO
<p>UU 41 tahun 1999 pasal 26,28 dan 36</p> <p>UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah</p> <p>Letak geografis.</p> <p>PP No 2 tahun 2008 tentang PNPB</p> <p>PP No. 3 tahun 2008 tentang tata hutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan, kawasan hutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. (S1 : O1). 2. Dengan adanya PERDA tentang pemanfaatan hutan pemerinatah dapat menarik retribusi dari pemanfaatan hutan tsb.(S1:O2) 3. Pengamanan peredaran hasil hutan lintas Kabupaten/kota.(S3:O3). 4. Penarikan tarif atas penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan.(S4 : O4) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan retribusi pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan kondisi wilayah cth: Agroforestry dan MPTS (Multi Purpose Tree Species).(W1:O1) 2. Meningkatkan Penerimaan daerah agar dapat membuka peluang kerja khususnya dalam bidang kehutanan.(W2:O2) 3. Meningkatkan sosialisasi tentang pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan. (W3:Os1)
Ancaman (Threat) (T)	Strategi ST	Strategi WT
<p>Keputusan Menteri kehutanan No SK.398/menhut.</p> <p>Penyalagunaan IPKTM yang berakibat adanya illegal logging.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran tata batas dan pemancangan PAL batas yang permanen.(S4 : T1). 2. Pengendalian melalui Peraturan Daerah berupa pemberian sanksi.(S1 : T2) 3. Lokasi IPKTM harus jelas secara geografis terhadap kawasan hutan negara, sehingga mudah dikontrol apabila pemegang izin melakukan penebangan diluar areal izin IPKTM. (S4 : T2) 4. Pemberian izin pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu.(S1:T1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penataan dan Delineasi hutan meliputi pembagian kawasan hutan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan, (W1 :T1) 2. Meningkatkan jumlah PNS dalam hal ini Dishutbun dan memberdayakan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyidik kasus illegal logging dan menyediakan dana operasional untuk menangani kasus illegal logging. W2:T2)

1. Strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang

Dalam matriks SWOT diatas telah digambarkan berbagai macam strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan Kekuatan dan Peluang, antara lain :

- a. Memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan izin pemanfaatan hutan tetapi dalam pemanfaatannya tetap memperhatikan kelestarian hutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- b. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan dalam rangka peningkatan PAD. Masyarakat yang diberikan izin pemanfaatan hasil hutan berkewajiban membayar retribusi yang kemudian dimasukkan kedalam kas daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Pengamanan peredaran hasil hutan lintas kabupaten / kota. Mengingat letak geografis Kab. Maros maka perlu adanya pengamanan terhadap masuk atau keluarnya hasil hutan dari Kab. Maros.
- d. Penarikan tarif terhadap penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan misalnya penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan.

2. Strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kelemahan dan Ancaman.

Berdasarkan hasil matrik SWOT diatas ada berbagai macam strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan Kelemahan dan Ancaman agar kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah dapat berjalan dengan baik, antara lain :

- a. Melakukan penataan dan deliniasi hutan meliputi pembagian kawasan hutan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan.
- b. Meningkatkan jumlah PNS dalam hal ini Dishutbun dan memberdayakan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyidik kasus illegal logging dan menyediakan dana operasional untuk menangani kasus illegal logging.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber sumber pendapatan asli daerah sektor kehutanan di Kab. Maros terdiri dari Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan, Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik dan Donasi pihak ketiga yang berasal dari hasil hutan kayu dan non kayu.
2. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Maros tiga tahun terakhir adalah pada tahun 2006 sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,004% dari total PAD Kab. Maros yaitu Rp 17.545.080.321,-, dan pada tahun 2007 mengalami penurunan 0,001% dari total PAD Kab Maros sebesar Rp.22.043.065.922,- dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,002% dari total PAD sebesar RP. 13.865.538.767,-.
3. Strategi yang dapat ditempuh pemerintah Kab Maros dalam meningkatkan PAD sektor kehutanan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan izin pemanfaatan hutan tetapi dalam pemanfaatannya tetap memperhatikan kelestarian hutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

- b. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan dalam rangka peningkatan PAD. Masyarakat yang diberikan izin pemanfaatan hasil hutan berkewajiban membayar retribusi yang kemudian dimasukkan kedalam kas daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Pengamanan peredaran hasil hutan lintas kabupaten / kota. Mengingat letak geografis Kab. Maros maka perlu adanya pengamanan terhadap masuk atau keluarnya hasil hutan dari Kab. Maros.

B. SARAN

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan perlu lebih meningkatkan lagi sosialisasi dengan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah setempat tentang pengelolaan hutan.
2. Penarikan retribusi pada taman nasional sebaiknya dimasukkan dalam pendapatan asli daerah sektor kehutanan mengingat taman nasional merupakan salah satu pengelolaan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Misi Teknis ITTO untuk Indonesia. 2001. *Desentralisasi Sektor Kehutanan..* Dephut dan ITTO
- Pusat Bina Kehutanan dan Perkebunan. 2000. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutana dan Perkebunan.* DEPHUTBUN Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 tahun 2002 *Tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan.* Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros.
- Peraturan Daerah Kbutan Maros Nomor 12 tahun 2002 *Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.* Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 tahun 2005 *Tentang Donasi.* Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros.
- Rangkuti, T. 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Suprie, D. 2008 *Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab Luwu* Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak dipublikasikan), Makassar.
- Surdrajat, A dan Yustina, I. 2002. *Mencari Format Desentralisasi Kehutanan Pada Masa Transisi.* Nectar Indonesia. Jakarta
- Tempointeraktif.com, 2004. *PP R.I No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.* Prn, 200403329-29,id.html
- Undang-Undang No.41 tahun 1999 *tentang Kehutanan.* <http://www.dephut.go.id/pdf> [10/9/2008]
- Undang-Undang No 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.* [http://www. Bpk.go.id/pdf](http://www.Bpk.go.id/pdf). [16/09/2008]
- Wijaya, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah TingkaT II.* PT Giafindo Persada. Jakarta